
Implementasi Peraturan Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2018 (Studi Kasus : Pembayaran Retribusi Sampah Botol Plastik di Suroboyo Bus)

Retno Windyastuti,¹ Zakariya,² Dida Rahmadanik³
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
retnowindyastuti28@gmail.com

Abstract

Policy implementation is a tool for the existence of policies in which to measure the success of policies, and made by policy makers. The policy itself is made based on problems that are within a scope. In this research, the researcher discusses about the implementation of Surabaya City Mayor No. 67 of 2018 concerning the Contribution of Plastic Bottle Waste in the Use of Surabaya Bus Services. This study aims to analyze the implementation of Perwali No.67 of 2018 on the Contribution of Waste in the Use of Surabaya Bus Services and analyze the factors that hinder and support from the existence of the policy. This research uses descriptive qualitative research methods, with using a case study approach. In solving the problem formulation, the research used the theory of Mazmanian and Sabatier's Top-Down public policy implementation which looked at 3 variables including: Independent Variables; Intervening Variables, and Dependent Variables. The results state that the implementation of Perwali No.67 of 2018 on the Contribution of Waste in the Use of Surabaya Bus Services through the Suroboyo Bus program is considered to be quite good, because of presence public support, and also the alignment of the destination with the real impact. However, there are still inhibiting factors, in this research namely: waiting time on a long stop; unfriendly bus attendant; the absence of a good system to regulate the specific auction of waste from Suroboyo Bus contributions; it has not been well integrated with regard to the procedure for the contribution of waste in the use of the Suroboyo Bus Service; less optimal repairs carried out by the relevant agencies regarding the limited collection of waste. The recommendation from the author is that there should be an increase in the fleet, improvement of the system regarding the auction process, and waste plastic bottle management.

Keywords— *Policy Implementation, Inhibiting and Supporting Factors, Suroboyo Bus*

Pendahuluan

Kota Surabaya merupakan kota metropolitan kedua setelah Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta. Didalam pembangunannya pemerintah kota Surabaya menciptakan berbagai inovasi baru dalam pelayanan publik, salah satunya adalah pelayanan dalam bidang transportasi angkutan umum. Transportasi tersebut yaitu Suroboyo Bus yang merupakan program transportasi publik yang dibuat Pemerintah Kota Surabaya dengan tujuan sebagai usaha dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan dari sampah plastik dan telah beroperasi sejak tahun 2018. Minat untuk menggunakan Surabaya Bus semakin meningkat setiap harinya, dimana pada akhir tahun 2018 penumpang Surabaya Bus mencapai 82.894 penumpang dan pada akhir tahun 2019 meningkat menjadi 137.395 penumpang.

Hal ini membuktikan bahwa Suroboyo bus memiliki keunikan tersendiri bagi masyarakat kota Surabaya, selain membayar menggunakan sampah botol plastik, fasilitas yang terdapat

dalam suroboyo bus juga dilengkapi oleh keamanan dan kenyamanan. Diantaranya yaitu terpasang sebanyak 12 kamera CCTV di dalam Bus dan sebanyak 3 kamera CCTV yang terpasang diluar bus. Serta terdapat pembagian kursi khusus penumpang laki-laki dan perempuan dan juga terdapat kursi khusus bagi penyandang disabilitas. Penyediaan fasilitas tersebut bertujuan untuk meminimalisir tindakan pelecehan seksual dan tindakan diskriminatif terhadap para penumpang.

Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 2.886.000 jiwa dengan luas sebesar 350,54 kilometer persegi, jika dirata – rata kepadatan penduduk kota Surabaya mencapai 8233,01 jiwa/kilometer persegi, hal ini menyebabkan tingkat penggunaan transportasi meningkat seiringnya waktu (D-one.com). Penduduk di kota Surabaya masih lebih memfavoritkan menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga pemerintah kota Surabaya berupaya dalam menangani hal tersebut melalui pengadaan Suroboyo Bus dan telah memberlakukan kebijakan yang mengatur jalannya Surabaya Bus. Kebijakan tersebut yaitu Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya. Pada bab III dibahas mengenai Tata Cara Kontribusi Sampah pada Pasal 2. Namun dari adanya kebijakan tersebut tidak menutup kemungkinan masih terjadi beberapa masalah yang di timbulkan dari regulasi pemerintah terkait penggunaan transportasi Suroboyo bus menggunakan pembayaran dengan botol plastik.

Kebijakan tersebut dinilai tidak fleksibel karena dalam pembayarannya menggunakan sampah botol plastik sedangkan pada era saat ini sudah terdapat pembayaran dengan menggunakan uang elektronik (e-money). Selain itu, masih adanya temuan pelanggaran bahwa dikenakan tarif selama penggunaan Suroboyo Bus ketika pengguna lupa tidak membawa sampah botol plastik. Permasalahan tersebut tentunya harus menjadi perhatian untuk pemerintah Kota Surabaya dimana pembayaran retribusi dalam menggunakan jasa transportasi publik pada Suroboyo Bus masih dinilai belum efektif dan fleksibel dan masih adanya petugas ataupun masyarakat yang belum sadar akan peran sampah botol plastik dalam kontribusi penggunaan layanan Suroboyo Bus. Berangkat dari adanya latar belakang tersebut maka perlu diteliti mengenai Implementasi Perwali No.67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah dalam Penggunaan Layanan Suroboyo Bus.

Kajian Teori

Menurut Kamal Alamsyah, (2016:27) dalam artian yang lebih luas, kebijakan publik merupakan tindakan pemerintahan daerah yang membawa dampak terhadap sebagian besar

orang. Terdapat beberapa pandangan mengenai kebijakan publik, dari Easton dalam Kamal Alamsyah, (2016: 28-29) yang mengatakan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai pengalokasian dari nilai-nilai yang ada, dengan cara memaksa (sah) yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang memiliki arti bahwa didalam penyelenggaraan kebijakan publik, pemerintahan daerah memiliki wewenang dalam hal melakukan tindakan-tindakan yang sah dan bersifat memaksa kepada masyarakat. Dapat dikatakan bahwa, pemerintah daerah memiliki kekuasaan dalam memilih dan mengalokasikan secara sah mengenai serangkaian tindakan yang terdapat dalam kebijakan publik kepada seluruh masyarakat dengan tujuan agar kepentingan publik dapat tercapai.

Implementasi dari kebijakan publik sendiri merupakan alat dari administrasi publik, yang didalamnya segala aspek seperti pelaku pembuat kebijakan, prosedur kebijakan, organisasi yang membuat kebijakan, serta teknik dan sumber daya di dalam organisasinya digerakkan secara bersamaan dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat yang berguna untuk mencapai dampak yang diinginkan dari kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini kebijakan terkait dengan adanya program Suroboyo Bus dimana menjadikan sampah botol plastik sebagai suatu bentuk kontribusi dalam penggunaan layanannya, yang telah diatur dalam Perwali Kota Surabaya No.67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah Dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya. Dimana jika ditelaah, dalam peraturan tersebut terdapat dari tujuan akan adanya kebijakan dibuat sehingga harus ada peraturan yang mengatur, tata cara kontribusi sampah, proses pengumpulan dan pencatatan yang dilakukan oleh Dinas yang merupakan pelaksana kebijakan, serta status dari adanya sampah botol plastik hasil kontribusi tersebut dan keberlanjutan dari sampah botol plastik hasil kontribusi tersebut. Dengan demikian, harus adanya kesesuaian dari adanya implementasi kebijakannya dengan isi dari perundang-undangan tersebut. Pada penelitian ini, penulis menggunakan model implementasi kebijakan Top-Down yang meliputi 3 variabel dimana setiap variabel memiliki indikator-indikator. Ke tiga variabel tersebut antara lain : Variabel Independen; Variabel Dependen; dan Variabel Intervening.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu yang pertama berada di Suroboyo Bus, tepatnya pada halte pemberhentian Suroboyo Bus Rute Barat – Timur di Gedung Park and Ride yang terletak di Jalan Mayjend Sungkono No. 124, Kota Surabaya. Kedua, di Kantor UPTD Pengelolahan Transportasi Umum yang mengelolah

Unit Suroboyo Bus yang terletak di Gedung Park and Ride yang terletak di Jalan Mayjend Sungkono No. 124, Kota Surabaya. Ketiga di Kantor Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya terkait dengan pengelolaan sampah botol plastic. Kantor DKRTH Kota Surabaya tersebut terletak di JL. Raya Menur No. 31 A, Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Robert K. Yin (2002:18) studi kasus digunakan guna menyelidiki fenomena yang terdapat didalam konteks dalam suatu kehidupan yang nyata dengan adanya batas-batas antara fenomena dan konteks tersebut tidak nampak dengan jelas sehingga memerlukan pemanfaatan dari berbagai sumber. Pada penelitian bertipe deskriptif kualitatif berupaya memberikan gambaran mengenai fenomena dan konteks tertentu secara terinci dan mendalam, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang jelas tanpa menggunakan uji statistika. Adapun tipe jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Indriantoro dan Supomo (2011:146) data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dan didapatkan melalui sumber aslinya. Pada penelitian ini jawaban dari data primer peneliti peroleh dari adanya hasil wawancara tidak berstruktur dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang merupakan fokus dari penelitian ini. Serta observasi non-partisipatif Sedangkan untuk hasil dari data sekunder peneliti dapatkan dari sumber berita mengenai fakta-fakta dari obyek yang penulis pilih yang didapatkan melalui media internet, data statistik mengenai data dari proyeksi penduduk di Indonesia menurut jenis kelamin pada tahun 2020, Proyeksi penduduk tahun 2020 menurut provinsi di Indonesia, laju pertumbuhan penumpang Surabaya Bus pada tahun 2018-2019, serta fakta-fakta maupun permasalahan terkait pembayaran botol plastik pada program Suroboyo Bus.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan Pada penentuan fokus penelitian ini menggunakan 3 variabel dari model implementasi kebijakan publik Top – Down menurut Mazmanian dan Sabatier dimana pada masing-masing variabelnya memiliki beberapa indikator didalamnya. Teori implementasi kebijakan publik tersebut digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang ada. Variabel-variabel dari model implementasi kebijakan publik Top-Down menurut Mazmanian dan Sabatier antara lain :

(1) Variabel model implementasi Top-Down menurut Mazmanian dan Sabatier dalam rangka pengimplementasian dari Perwali No. 67 Tahun 2018 tentang retribusi pembayaran botol plastik pada Suroboyo Bus meliputi:

A. Variabel Dependen, dengan melihat beberapa indikator yaitu : (a) output kebijakan dari badan pelaksana; (b) kesediaan kelompok sasaran dalam mematuhi output kebijakan; (c) dampak nyata dari output kebijakan; (d) dan perbaikan.

(2) Variabel dari model implementasi Top-Down menurut Mazmanian dan Sabatier terkait faktor penghambat dan pendukung dalam rangka implementasi Perwali No.67 Tahun 2018 tentang retribusi pembayaran botol plastik pada Suroboyo Bus meliputi :

A. Variabel Independen dengan melihat indikator : (a) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap.

B. Variabel Intervening dengan melihat indikator : (a) Kejelasan dari suatu tujuan kebijakan; (b) Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan sebuah proses implementasi secara tepat; (c) dukungan publik.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini berisikan mengenai pemaparan dari temuan berdasarkan penelitian langsung serta analisis dari hasil temuan tersebut, dan sesuai dengan rumusan masalah yang diusung. Seperti yang dikatakan oleh Mazmanian dan Sabatier bahwa analisis implementasi kebijakan suatu negara memiliki peran penting yaitu untuk mengidentifikasi indikator dari suatu variabel. Dimana variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi pencapaian dari adanya tujuan formal yang terdapat didalam suatu proses implementasi. Dengan demikian, penelitian ini penulis menggunakan model implementasi kebijakan publik Top-Down Mazmanian dan Sabatier dengan melihat indikator-indikator dari setiap variabel.

1. Implementasi Perwali Kota Surabaya No.67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah Dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya

1) Variabel Dependen

1. Output kebijakan

Suatu kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan tersebut merupakan tujuan yang ideal seperti halnya mendapatkan keamanan, kenyamanan, keadilan, kebebasan, ataupun

tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Menurut Wibawa dalam Kamal Alamsyah, (2016:30) poin yang terdapat kedalam tujuan yang ideal tersebut, sering dijadikan patokan dari adanya kebijakan, tindakan pemerintah, atau juga pertimbangan dalam hal melakukan atau tidak melakukan, serta poin-poin tersebut juga dipakai sebagai kriteria dan dijadikan sebagai standar evaluasi atas program tersebut

Terkait dengan teori tersebut, jika dikaitkan dengan penelitian ini dimana dalam hasil yang ditemukan dilapangan melalui temuan langsung oleh penulis ketika melakukan observasi menyatakan bahwa adanya tanggapan yang positif dari warga kota Surabaya terkait program tersebut. Dalam hal ini, dibuktikan melalui banyaknya penumpang Suroboyo Bus yang menggunakan layanan tersebut pada hari kerja maupun hari libur. . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, output kebijakan ini telah berhasil berjalan sampai pada proses peimplementasiannya

2. Ketersediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan

Menurut pandangan dari Easton dalam Kamal Alamsyah, (2016: 28-29) yang mengatakan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai pengalokasian dari nilai-nilai yang ada, dengan cara memaksa (sah) yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, bahwa dalam suatu proses implementasi kebijakan, setiap lapisan individu masyarakat yang merupakan kelompok sasaran dari adanya kebijakan tersebut; pelaksana kebijakan; ataupun swasta harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari adanya kebijakan tersebut. Karena pada dasarnya kebijakan adalah bersifat memaksa..

Dalam hal ini, terkait dengan ketersediaan kelompok sasaran untuk mematuhi akan output kebijakan tersebut, sesuai dengan hasil temuan dilapangan, bahwa dalam proses implementasinya masih terdapat pengguna Suroboyo Bus yang belum mentaati peraturan. Dimana hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Kepala Unit Suroboyo Bus yang mengatakan bahwa masih ada penumpang Suroboyo Bus yang ingin membayar dengan uang dan menyalahgunakan tiket untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, hal ini diperkuat oleh penumpang Suroboyo Bus yang mengatakan bahwa masih adanya penumpang yang membawa botol plastik kurang dari jumlah yang telah ditetapkan.

3. Dampak nyata output kebijakan

Menurut Kamal Alamsyah, (2016:27) dalam artian yang lebih luas, kebijakan publik merupakan tindakan pemerintahan daerah yang membawa dampak terhadap sebagian besar orang. Dimana dalam hal ini, terkait dengan kebijakan tersebut terdapat dampak yang ditimbulkan dapat dilihat melalui penemuan langsung penulis dilapangan. Penemuan tersebut menyatakan bahwa kebijakan tersebut, membawa dampak yang nyata dimana dampak tersebut dapat dirasakan oleh pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan. Seperti halnya, penambahan Khas Daerah yang diperoleh dari pelelangan hasil kontribusi sampah dalam penggunaan layanan Suroboyo Bus.

Hal tersebut sesuai dengan isi Perwali Kota Surabaya No. 67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah dalam Penggunaan Layanan Suroboyo Bus yang terdapat pada Pasal 7 dan Pasal 8. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang pengguna kebijakan, mereka lebih bijak dalam pemanfaatan sampah botol plastik, dengan cara melakukan pengumpulan untuk dimanfaatkan dengan ditukarkan kartu agar bisa menggunakan layanan Suroboyo Bus. Dengan begitu, masyarakat bisa menekan biaya pengeluaran yang sebenarnya akan dipakai untuk biaya transportasi.

4. Perbaikan

Dalam proses pe-implemmentasian suatu kebijakan, akan ada kendala-kendala didalamnya. Seperti halnya, dalam proses implementasi Perwali Kota Surabaya No. 67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah dalam Penggunaan Layanan Suroboyo Bus terkait penggunaan layanan pada Suroboyo Bus adalah terletak didalam proses pengumpulan dan pencatatan dokumen. Dimana dalam hal tersebut, apabila semakin lama pencatatan dokumen terkait dengan data sampah botol plastik bekas yang merupakan hasil dari kontribusi penggunaan Suroboyo Bus, maka semakin menumpuk pula sampah yang dihasilkan. Karena tidak dapat segera dilelang dan juga tempat untuk pengumpulan yang terbatas. Selain itu, juga

terdapat kendala mengenai lamanya waktu yang diperlukan untuk menunggu kedatangan armada bus.

Jadi perbaikan-perbaikan dari hal tersebut perlu dilakukan, seperti halnya terkait kendala yang dialami oleh pihak DKRTH tersebut, upayanya yaitu dengan segera memberikan laporan kepada atasan, dan segera melaporkan bahwa sampah hasil kontribusi penggunaan Suroboyo Bus sudah menumpuk dan harus segera dilakukan pelelangan. Perbaikan dalam suatu proses implementasi kebijakan, karena demi keberlangsungan berjalannya kebijakan tersebut dan kualitas yang dihasilkan khususnya untuk pengguna kebijakan tersebut. Kemudian, terkait dengan kendala mengenai lamanya menunggu kedatangan armada bus berikutnya, dirasa perlu perhatian melalui Dinas terkait dengan melakukan penambahan armada bus.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Perwali Kota Surabaya No.67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah Dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya.

2.1 Faktor Penghambat :

2.1.1. Variabel Independen

2.1.1.1 Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap

Kamal Alamsyah, (2016:63-64) menyebutkan bahwa karakteristik dari masalah tersebut selain memiliki sifat berketergantungan, juga memiliki sifat dinamis. Sehingga dalam upaya pemecahan masalahnya memerlukan beberapa pendekatan yang memandang bahwa suatu masalah tidak dapat dipisahkan ataupun diukur secara terpisah dari faktor lainnya. Dalam penelitian ini karakteristik suatu masalah tersebut dilihat melalui kesukaran teknis yang dihadapi yang merupakan faktor penghambat dari implementasi kebijakan tersebut sebagai berikut:

- 1) Kesukaran-kesukaran teknis yang dialami oleh para pelaksana kebijakan. Dimana dalam hal tersebut, terkait dengan terbatasnya tempat pengumpulan sampah hasil dari kontribusi sampah botol plastik dalam penggunaan layanan

Suroboyo Bus, sehingga mengakibatkan penumpukan sampah di rumah kompos. Dan kurang optimalnya perbaikan yang dilakukan atas kendala tersebut. Sehingga upaya yang dilakukan hanya berdasarkan laporan dari bawahan ke atasan, tanpa adanya solusi untuk menambah tempat pengumpulan sampah hasil kontribusi Suroboyo Bus.

- 2) Selain itu, masih belum berjalan dengan baik dan terintegrasi tentang tata cara kontribusi sampah terkait dengan jumlah botol plastik yang akan ditukarkan, karena kurangnya edukasi dari petugas Suroboyo Bus dalam hal tersebut. Hal itu terutama sering terjadi didalam bus, yang notabennya jarang dilakukan pengecekan terkait sampah botol plastik yang akan ditukarkan.
- 3) Belum adanya sistem yang baik untuk mengatur mengenai khusus pelelangan dari sampah hasil kontribusi Suroboyo Bus tersebut. Hal ini dilihat melalui pelelangan yang ke 3 dan 4 dimana sempat gagal karena tidak memiliki sistem yang baik dan terhambat masalah diluar faktor tersebut.

2.1.2 Variabel Intervening

1. Keterpaduan hierarki pelaksana kebijakan dalam hubungan koordinasi dan pelaksana dengan pengguna kebijakan

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier lebih memfokuskan kepada isi dari perundang-undangan terkait dengan kebijakan publik yang ada, interaksi dari aktor yang terlibat didalam pembuat kebijakan dan pengguna dari hasil kebijakan, serta berpengaruhnya implementasi kebijakan tersebut terhadap lingkungan. Dalam penelitian ini, terkait dengan interaksi aktor yang terlibat dalam pembuat kebijakan tersebut, menurut hasil temuan dilapangan masih adanya interaksi yang belum berjalan dengan baik. Interaksi disini yang dimaksud adalah petugas Suroboyo Bus dengan pelaksana kebijakan. Dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dari kebijakan tersebut. Penjelasan tersebut antara lain: Kurang ramahnya petugas Suroboyo Bus dalam memberikan layanan kepada penumpang Suroboyo Bus

2.2 Faktor Pendukung :

2.2.1 Variabel Intervening

1. Kecermatan dan kejelasan suatu tujuan yang diinginkan

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Abdul Wahab dalam Kamal Alamsyah, (2016: 61-62) mengatakan bahwa proses implementasi sebagai suatu tindakan yang dilakukan dimana pejabat, individu, ataupun suatu kelompok pemerintahan maupun swasta dan diarahkan kepada usaha untuk mencapai suatu tujuan sebagaimana telah digariskan di dalam suatu keputusan kebijakan. Dalam hasil yang ditemukan pada penelitian ini, menyatakan bahwa adanya kejelasan terkait dengan tujuan yang diinginkan dalam implementasi tersebut. Dimana dalam hal ini tujuan dari kebijakan tersebut telah tercantum dalam Perwali Kota Surabaya No. 67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah Dalam Penggunaan Layanan Suroboyo Bus.

Selain itu, bukti akan adanya dari kejelasan tujuan yang ingin dicapai dapat dilihat melalui adanya dampak dari perubahan perilaku dari penumpang Suroboyo Bus, yang dimana sebelum adanya program Suroboyo Bus mereka tidak pernah bijak dalam pemanfaatan sampah. Setelah ada program ini mereka lebih bijak dalam pemanfaatan sampah, dan secara tidak langsung turut andil dalam menjaga kebersihan lingkungan kota Surabaya. Dengan demikian, dengan adanya tujuan yang jelas serta adanya suatu pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, dapat dikatakan sebagai salah satu faktor pendukung dari implementasi kebijakan tersebut.

2. Keterpaduan hierarki pelaksana kebijakan dalam hubungan koordinasi pelaksana dengan pengguna kebijakan

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier lebih memfokuskan kepada isi dari perundang-undangan terkait dengan

kebijakan publik yang ada, interaksi dari aktor yang terlibat didalam pembuat kebijakan dan pengguna dari hasil kebijakan, serta berpengaruhnya implementasi kebijakan tersebut terhadap lingkungan. Hubungan koordinasi antar pelaksana kebijakan merupakan suatu hal yang penulis rasa penting, karena demi keberlangsungan dari adanya implementasi kebijakan tersebut.

Dimana dalam temuan tersebut hasilnya menyatakan bawa adanya hubungan koordinasi antara pelaksana kebijakan baik didalam ruang lingkup birokrasi maupun antar instansi pelaksana. Dimana dalam hal ini, dibuktikan mengenai adanya pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan hubungan koordinasi tersebut tidak dilakukan hanya sekedar koordinasi kemudian selesai. Namun hubungan koordinasi tersebut dilakukan secara berkelanjutan sampai dengan proses evaluasi. Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu faktor pendukung dari adanya implementasi kebijakan terkait program Suroboyo Bus.

3. Dukungan Publik

Kebijakan publik dibuat demi kepentingan publik. Dalam pengambilan keputusannya, aktor yang terlibat dalam mengambil keputusan harus memiliki landasan yang kuat dalam pembuatan kebijakan tersebut, agar nantinya kebijakan tersebut dapat terselenggara sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Menurut Kamal Alamsyah, (2016:27) dalam artian yang lebih luas, kebijakan publik merupakan tindakan pemerintahan daerah yang membawa dampak terhadap sebagian besar orang. Selain adanya dampak yang ditimbulkan, suatu kebijakan publik juga memerlukan dukungan publik dalam proses pengimplementasiannya.

Dimana dukungan tersebut merupakan suatu faktor pendukung yang nantinya akan dapat menjadikan proses implementasi dari kebijakan tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini, sesuai dengan hasil temuan dilapangan yang menyatakan bahwa adanya dukungan publik terkait program Suroboyo Bus yang menggunakan sampah botol plastik. Dalam hal ini dibuktikan melalui antusiasnya warga kota Surabaya untuk menggunakan layanan Suroboyo Bus tersebut. Dengan ditinjau sesuai pernyataan dari Kepala Unit Suroboyo Bus yang mengatakan bahwa sampai saat ini penumpang Suroboyo Bus mencapai dua (2) juta bahkan lebih.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan dari adanya penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Variabel Independen

Dari Variabel ini dapat disimpulkan bahwa dalam pe-implemmentasian Perwali No. 67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya terkait program Suroboyo Bus terbilang masih memiliki kesukaran teknis, dimana terkait dengan tempat untuk pengumpulan sampah yang masih terbatas. Hal ini mengakibatkan penumpukan sampah, dan terhambatnya proses pencatatan dan pelaporan dokumen terkait jumlah sampah hasil kontribusi penggunaan layanan Suroboyo Bus yang sudah terkumpul. Sehingga mengakibatkan pelelangan gagal. Disamping itu juga, belum adanya sistem yang baik guna mengatur mengenai pelelangan tersebut. Dan juga belum terintegrasi dengan baik mengenai tata cara kontribusi sampah botol plastik, yang dibuktikan dengan masih adanya penumpang yang ingin membayar menggunakan uang.

2. Variabel Intervening

Dari variabel ini dimana dalam pengimplementasiannya mengenai tujuan yang ingin dicapai melalui program Suroboyo Bus sudah sangat jelas dan sudah termaktub di dalam Perwali No. 67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya. Dimana didukung dengan antusiasnya warga Kota Surabaya untuk menggunakan layanan Suroboyo Bus tersebut. Dan hal itu tidak terlepas dari hubungan koordinasi antara sesama pelaksana kebijakan, yang dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaannya mereka sudah sangat terkoordinir, karena adanya proses evaluasi dan termasuk ke dalam multi OPD.

3. Variabel Dependen

Dari variabel ini dilihat melalui output dari suatu kebijakan. Output tersebut

3. Variabel Dependen

Dari variabel ini dilihat melalui output dari suatu kebijakan. Output tersebut adalah kebijakan mengenai program Suroboyo Bus yang menggunakan sampah botol plastik sebagai kontribusi warga kota Surabaya dalam penggunaan layanannya. Hal tersebut jelas bahwa sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dari adanya kebijakan tersebut, menimbulkan dampak yang dapat dirasakan oleh pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan. Dimana hal tersebut seperti adanya penambahan Khas Daerah dari hasil yang diperoleh melalui kontribusi sampah botol plastik dalam penggunaan layanan Bus Suroboyo. Karena hasil tersebut akan dilelang. Disamping itu, masih adanya masalah dan kendala, dimana masih adanya pengguna Suroboyo Bus yang ingin membayar dengan uang, serta tempat pengumpulan sampah yang sangat terbatas dan kurangnya edukasi melalui petugas terkait tata cara kontribusi sampah dalam penggunaan layanan tersebut.

4. Faktor Penghambat

- a) Waktu tunggu dihalte yang lama
- b) Kurang ramahnya petugas Suroboyo Bus dalam memberikan pelayanan
- c) Belum adanya sistem yang baik untuk mengatur mengenai khusus pelelangan dari sampah hasil kontribusi Suroboyo Bus.
- d) Belum terintegrasi dengan baik terkait dengan tata cara kontribusi sampah dalam penggunaan Layanan Suroboyo Bus
- e) Kurang optimalnya perbaikan atau upaya yang dilakukan oleh Dinas terkait mengenai tempat pengumpulan sampah yang terbatas.

5. Faktor Pendukung

- a) Adanya kejelasan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dalam implementasi tersebut
- b) Adanya hubungan koordinasi yang baik dan berkelanjutan antara pelaksana kebijakan baik didalam ruang lingkup birokrasi maupun antar instansi pelaksana
- c) Adanya dukungan publik terkait program Suroboyo Bus yang menggunakan sampah botol plastik.

Saran

Untuk mengembangkan program dari Suroboyo Bus tersebut, dimana merupakan program Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang transportasi publik yang menggunakan sampah botol plastik sebagai hasil dari kontribusi penggunaan layanannya, dengan tujuan untuk mengurangi sampah di daerah perkotaan, dan juga untuk mengajak warga kota Surabaya agar bijak dalam pemanfaatannya, maka Adapun solusi yang peneliti berikan terkait dengan faktor penghambat dari implementasi tersebut antara lain :

1. Adanya penambahan armada Suroboyo Bus agar waktu tunggu di halte tidak terlalu lama. Sehingga penumpang Suroboyo Bus dapat merasa puas akan layanan yang diberikan.
2. Adanya kotak dan saran dari penumpang Suroboyo Bus terkait dengan kepuasan selama menggunakan jasa transportasi tersebut. Hal itu peneliti maksudkan, untuk suatu upaya evaluasi dari pelayanan yang diberikan oleh petugas Suroboyo Bus terhadap penumpang.
3. Menambah edukasi lagi terhadap warga kota Surabaya akan peran sampah botol plastik dalam penggunaan layanan Suroboyo Bus, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk edukasi tersebut dapat di implementasikan berupa penyuluhan melalui sosial media Suroboyo Bus, serta dapat juga melalui video platform di setiap Park and Ride dan terminal yang dijadikan lokasi pemberhentian armada Suroboyo Bus.
4. Menambah tempat khusus untuk pengumpulan sampah hasil kontribusi Suroboyo Bus, agar tidak terjadi penumpukan. Penambahan tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemilik Bank Sampah di Kota Surabaya. Serta memperbaiki sistem kerja terkait dengan pencatatan dan pelaporan dokumen mengenai hasil

kontribusi sampah botol plastik dalam penggunaan Suroboyo Bus melalui adanya rancangan kerja dan penyusunan laporan dimaksudkan agar dapat terlaksana secara efektif.

Daftar Pustaka

Alamsyah, K., & Alamsyah, K. 2019. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*.

Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi &*

Manajemen. Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI. Dalam Jurnal : Putri, Ade Rahma.2019.

Efektivitas Intensif dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Digital Repository Unila.

<http://digilib.unila.ac.id/58575/>

Robert K. Yin. 2002. *Studi Kasus : Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pres.

Peraturan Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah Botol Plastik dalam Penggunaan Layanan Suroboyo Bus